

Demi Kebenaran Dan Keadilan

WASPADA

Harian Umum Nasional Terbit Sejak 11 Januari 1947. Pendiri: H. Mohd. Said (1905-1995), Hj. Ani Idrus (1918-1999)
ISSN: 0215-3017

RABU, Kliwon, 27 November 2013/23 Muharram 1435 H No: 24413 Tahun Ke-67 Terbit 24 halaman

Membangun Masyarakat Tangguh Bencana

Oleh Drs Indra Muda Hutasuhut, MAP Dan Dr Abdul Kadir, MSi

Pada beberapa daerah yang memiliki potensi terjadinya bencana, baiknya memasyarakatkan kembali kearifan lokal yang sudah dianut turun temurun.

Setiap memasuki bulan September, Oktober, November, Desember, bahkan hingga April tahun berikutnya, intensitas bencana alam di Indonesia termasuk Sumatera Utara meningkat. Ancaman bencana didominasi banjir, karena pada bulan ini intensitas curah hujan lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya. Dampak banjir menimbulkan kerugian seperti, rusaknya peralatan rumah tangga, rusaknya rumah tempat hunian, bahkan jatuhnya korban jiwa. Atas kejadian ini, sikap masyarakat bahkan pemerintah terkesan pasrah, tanpa usaha maksimal untuk keluar dari bencana tahunan ini.

Modus peristiwa banjir dari tahun ke tahun hampir sama yaitu, terjadinya pendangkalan sungai, penyempitan sungai akibat adanya hangunan liar dan perambahan hutan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS). Selain itu tidak berfungsinya selokan/parit di tempat hunian penduduk akibat membuang sampah sembarangan, hunian penduduk tidak memiliki sistem drainase sesuai pemanfaatannya dan lain-lain. Ini senada pernyataan Kepala BPDAS Wampu Sei Ular yang mengatakan, "31.000 hektar Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sumatera Utara kritis akibat kerusakan kawasan hutan di hulu sungai".

Sebagai peristiwa tahunan, upaya apa yang dilakukan *stakeholders* (masyarakat, swasta dan pemerintah) untuk keluar dari musibah bencana? Kalau kita mau jujur, upaya pemerintah dan masyarakat belum maksimal, bahkan dampak banjir semakin meluas. Misalnya, banjir Jakarta 2012 sudah mencapai bundaran Hotel Indonesia dan sebagian lingkungan Istana Negara. Demikian juga dengan banjir kota Medan, kanal penampungan air yang telah rampung

ternyata tidak berfungsi sebagai mana mestinya. Demikian juga kota Palembang yang dibelah Sungai Musi tanpa dapat berbuat banyak, setiap tahun tetap menjadi langganan banjir. Singkat kata, hampir seluruh daerah di Indonesia rawan banjir tanpa ada penanganan maksimal.

Membangun Masyarakat Tangguh Bencana

Dalam Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan, "Pemerintah sebagai penanggungjawab penanggulangan bencana dengan peran serta aktif masyarakat dan lembaga usaha". UU ini mengindikasikan, penanggulangan bencana perlu dilakukan kerjasama terpadu antara pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha sehingga setiap adanya indikasi yang memiliki potensi terjadinya bencana dapat diantisipasi sedini mungkin. Karena itu untuk membangun masyarakat agar tangguh menghadapi bencana, dapat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu, Pra bencana, pada saat bencana, dan pasca bencana.

Pada tahap pra bencana, dilakukan langkah pencegahan oleh berbagai pihak agar bencana dapat dicegah melalui kerjasama *stakeholders* (masyarakat, swasta dan pemerintah). Potensi bencana pada masing-masing daerah tentu berbeda bagi penduduk yang berdomisili di daerah pantai potensi bencana dapat berupa tsunami, angin puting beliung, sedangkan bagi penduduk yang bermukim di daerah perbukitan potensi bendanya dapat berupa tanah longsor, pengeseran tanah. Sementara bagi masyarakat di dataran rendah, potensi bencana dapat berupa banjir, angin puting beliung, dan penduduk di sekitar

gunung merapi potensi bencana terutama adalah lahar panas, banjir lahar dingin, erupsi, angin puting beliung dan bahkan terjadinya tanah longsor.

Untuk meminimalkan dampak bencana, maka kepada masyarakat perlu disampaikan informasi, pendidikan atau pelatihan tentang faktor yang dapat memicu bencana. Misalnya bagi masyarakat dekat sungai disarankan tidak membuang sampah ke sungai. Bagi masyarakat di perbukitan, dekat hutan atau gunung merapi disarankan tidak merusak lingkungan karena dapat memicu terjadinya banjir, tsunaminya keseimbangan alam. Karena masih banyak diantara warga yang tidak memahami secara benar dampak buruk dari membuang sampah ke sungai atau melakukan perambahan hutan secara liar. Dengan sosialisasi dan informasi ini masyarakat akan dapat menyadari kesalahannya.

Pemerintah dan pihak swasta (pengusaha) tentunya juga harus dapat bersikap adil, dengan kata lain tidak melakukan perambahan hutan secara sembarangan dengan berlindung di balik legalitas perundang-undangan. Karena kerusakan hutan di Indonesia hampir 60 persen diakibatkan pemanfaatan legalitas yang menyalahi kuota yang diberikan pemerintah *illegal logging*.

Pada beberapa daerah yang memiliki potensi terjadinya bencana, baiknya masyarakatkan kembali kearifan lokal yang sudah dianut turun temurun. Misalnya, di Kabupaten Seumawe Aceh sebutan *Smong* yang berarti *tsunami*. Masyarakat di daerah ini percaya apabila air laut surut pasca terjadinya gempa bumi, harus lari ke gunung mencari tempat tinggi menyelamatkan diri. Dengan kearifan lokal tersebut, sewaktu terjadinya gempa bumi dan tsunami Aceh 26 Desember 2004, masyarakat di daerah ini tidak banyak yang menjadi korban dibandingkan korban di Meulaboh dan Banda Aceh.

Demikian juga bagi masyarakat di sekitar gunung merapi, ada kearifan lokal yang menunjukkan tanda-tanda meletusnya gunung merapi seperti, hewan secara berke-

lompok turun meninggalkan gunung, bau belerang menyengat. Bagi masyarakat di dataran rendah, kearifan lokal yang menjadi pertanda banjir seperti, semut, ular dalam jumlah besar keluar dari sarangnya, suara katak semakin menderu dan lain-lain. Kearifan lokal ini tentu dapat dilestarikan agar dapat menjadi peringatan dini untuk menghindari dan bencana. Kearifan ini tentu dapat dipadukan dengan informasi yang disampaikan PVMBG, BMKG, BNPB yang memiliki kapasitas memberikan informasi tentang kemungkinan terjadinya bencana.

Pada tahapan kedua yaitu saat terjadinya bencana, langkah yang dapat dilakukan adalah membantu korban yang ditimpa musibah bencana. Misalnya, menyerahkan bantuan bahan makanan, minuman, tempat pengungsian sementara, pencarian korban baik yang meninggal maupun korban selamat yang membutuhkan perawatan. Pendistribusian bantuan tentu harus dilakukan secara cepat.

Tahapan yang ketiga yaitu pasca bencana. Masyarakat yang ditimpa bencana sudah pasti mengalami tekanan psikologis, trauma, karena itu mereka perlu dilampiasi psikolog. Demikian juga dengan sektor usaha (pertanian, perikanan, perkebunan dan usaha lainnya) yang rusak akibat bencana, perlu bantuan dan renovasi kembali agar mereka memiliki kembali sektor mata pencaharian yang menjadi sumber perekonomian keluarga.

Hingga penghujung Nopember 2013, ancaman bencana di Indonesia tergolong tinggi. Relajar dari pengalaman kejadian bencana tahun sebelumnya, pemerintah, swasta dan rakyat Indonesia perlu membangun komitmen untuk bersinergi mengatasi bencana alam, termasuk mengembalikan fungsi hutan sebagai pengendali bencana alam. Dengan sinergitas tersebut, masyarakat akan dapat membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana. Semoga!

Para Penulis adalah Dosen Histopol
Universitas Madan Area